

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN *JOB RELEVANT INFORMATION* (JRI) TERHADAP ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi pada Rumah Sakit Umum yang Sudah BLU di Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

YULIA HANDAYANI

00386/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi – Sektor Publik Fakultas Ekonomi

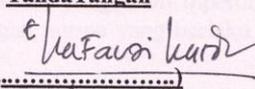
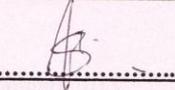
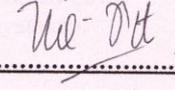
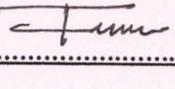
Universitas Negeri Padang

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN *JOB RELEVANT INFORMATION*
(JRI) TERHADAP ASIMETRI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Rumah Sakit Yang Sudah BLU di Sumatera Barat)**

Nama : YULIA HANDAYANI
NIM/BP : 00386/2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

<u>No</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1	Ketua	Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	 (.....)
2	Sekretaris	Salma Taqwa, SE, M.Si	 (.....)
3	Anggota	Nelvirita, SE, M.Si, Ak	 (.....)
4	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	 (.....)

ABSTRAK

Yulia Handayani. 00386. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information* (jri) Terhadap Asimetri Informasi Sebagai Variabel Intervening.

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

II : Salma Taqwa, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi. (2) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap *job relevant information* (jri). (3) Pengaruh *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi. (4) Pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri). Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah rumah sakit umum yang sudah BLU. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan mengambil empat buah rumah sakit yang sudah BLU di Sumatera Barat. Pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden yaitu semua kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian rumah sakit. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan partisipasi anggaran sebagai variabel eksogen, asimetri informasi sebagai variabel endogen, dan JRI sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,246 > 1,687$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,395 (H_1 ditolak). (2) Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap JRI dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $11,535 > 1,687$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,882 (H_2 diterima). (3) JRI tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $11,405 > 1,687$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,622 (H_3 ditolak). (4) Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri) dengan nilai 21,67%. Variabel intervening meningkatkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 21,67% (H_4 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi semua kepala yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam penyusunan anggaran, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik antara atasan dan bawahan, serta menghasilkan rancangan anggaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu juga disarankan agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi asimetri informasi. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi asimetri informasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Asimetri Informasi Sebagai Variabel Intervening”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu kepala sub bagian, kepala bagian, dan kepala seksi rumah sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua beserta kakak tercinta serta segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Pembatasan Masalah	17
D. Perumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	19
A. Kajian Teori	19
1. Asimetri Informasi.....	19
2. Partisipasi Anggaran	26
3. <i>Job Relevant Information (JRI)</i>	31
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Pengembangan Hipotesis	36
D. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis Dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44

E. Variabel Penelitian	45
F. Pengukuran Variabel	46
G. Instrumen Penelitian.....	46
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	48
I. Uji Coba Instrumen	48
J. Uji Asumsi Klasik	49
K. Teknik Analisis Data	51
L. Definisi Operasional	58
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Sampel dan Responden Penelitian	60
B. Analisis Deskriptif	61
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	70
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	71
E. Uji Model	74
F. Pembahasan	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan	92
C. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Skor Jawaban Pertanyaan Berdasarkan Sifat	46
3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	47
3.3 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	49
4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	60
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	61
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	62
4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
4.5 Statistik Deskriptif	64
4.6 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Partisipasi Anggaran	65
4.7 Distribusi Frekuensi Skor Variabel <i>Job Relevant Information</i> (JRI)...	67
4.8 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Asimetri Informasi	68
4.9 Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil	70
4.10 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	71
4.11 Uji Normalitas	72
4.12 Uji Heteroskedastisitas.....	73
4.13 Uji Model Sub Struktur I	75
4.14 Koefisien Regresi Sub Struktur I	75
4.15 Uji Model Sub Struktur II	77
4.16 Uji Regresi Sub Struktur II	77
4.17 Uji F Statistik	79
4.18 Koefisien determinasi.....	80
4.22 Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	41
3.1 Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	53
3.2 Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 Terhadap X_2	53
3.3 Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	54
4.1 Diagram Jalur Pengaruh X_1 Terhadap X_2	76
4.2 Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	78
4.3 Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	98
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	103
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	108
4. Uji Asumsi Klasik	113
5. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	114
6. Uji F dan Uji Koefisien Determinasi	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam.

Badan Layanan Umum/BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Rumah sakit BLU adalah rumah sakit pemerintah yang menjual jasa pelayanan rumah-sakit *not-for-profit* tetapi tetap dikelola dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan memiliki bentuk sebagai organisasi BLU, maka rumah sakit memiliki pola pengelolaan keuangan (PPK) yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini baik secara langsung

maupun tidak langsung berimbas pada paradigma rumah sakit yang dulunya merupakan lembaga yang *cost centre*, kini harus merubah orientasinya dengan memadukan *service publik oriented* dan *profit oriented* serta mengedepankan terciptanya suatu lembaga publik yang berorientasi pada *value for money*.

Dalam penyusunan anggaran rumah sakit diperlukan partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) untuk mencegah terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi ketika bawahan mempunyai informasi yang lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan atasan. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi yaitu suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara atasan dengan bawahan. Menurut Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak luar.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang bawahan tidak seluruhnya diketahui oleh atasan. Sehingga bawahan dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan atasan yang melanggar etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dunk (1993) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2)

manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

Pada teori *agency* asimetri informasi merupakan sesuatu yang penting untuk diperhitungkan antara bawahan sebagai *agent* dan atasan sebagai *principal*. Asimetri informasi muncul ketika bawahan lebih tahu mengenai informasi internal dan prospek perusahaan dimasa datang dibandingkan atasan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269) dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika atasan mempekerjakan satu orang atau lebih bawahan untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan tersebut.

Salah satu contoh asimetri informasi adalah informasi lokal, artinya informasi dibuat sedemikian rupa agar pimpinan merasa senang (Penko et.al, 1984) dalam Fitri (2004). Leary dan Michaely (2008) menyatakan bahwa asimetri informasi akan terjadi lebih besar dengan kesempatan bertumbuh yang lebih besar juga. Untuk itu diperlukan partisipasi anggaran agar informasi yang diperoleh dapat dikomunikasikan kepada atasan.

Anggaran merupakan sebuah alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi dan pengendalian. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan

rencana-rencana manajemen di dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan aktivitas (Harefa, 2008).

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya, pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi, maka proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dapat dilakukan agar sesuai dengan tujuan anggaran (Govindarajan, 2005).

Menurut Hansen dan Mowen (2004:1), setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.

Anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Menurut Mardismo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Munandar (2007:1), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Menurut Mulyadi (2001:13) anggaran merupakan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam kesatuan moneter, atau ukuran yang lain dalam jangka waktu satu tahun. Anthony dan Govindarajan (2005:87) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana dalam kuantitas yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Proses penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu *top-down*, *bottom up*, dan partisipasi (Rahmadhani dan Nasution, 2009). Di dalam penyusunan anggaran keterlibatan berbagai komponen unit kerja didalam rumah sakit sangat diperlukan. Anggaran dengan metode *top-down* disusun sendiri oleh manajer puncak (CEO) untuk keseluruhan organisasi tanpa melibatkan bawahan, sedangkan anggaran dengan metode *bottom-up* disusun oleh manajer pusat pertanggungjawaban (MPP) yang dianggap mampu menyusun anggaran sendiri oleh manajer puncak kemudian ditinjau, disesuaikan, dan disetujui oleh manajer puncak, dan yang terakhir yaitu anggaran dengan pendekatan campuran disusun bersama antara manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban.

Penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, pada pendekatan ini rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan sehingga bawahan hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (*overloaded*). Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya kinerja bawahan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan konsekuensi perlunya perubahan pendekatan pada manajemen keuangan daerah.

Namun otonomi daerah yang terbentuk menciptakan kesenjangan dalam penganggaran daerah, kesenjangan terjadi antara divisi-divisi yang ada dalam pemerintahan atau antara bawahan dengan atasan. Berdasarkan kondisi ini, sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah di atas, yakni anggaran partisipasi (*participaty budgeting*). Menurut Mulyadi (2001:513) partisipasi merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua belah pihak/lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut.

Melalui sistem ini, bawahan dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai anggaran tersebut. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga mempengaruhi kinerja manajerial, karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan merasa

terlibat dan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2005:88).

Berbeda dengan penganggaran partisipatif di perusahaan (bisnis), penganggaran di pemerintahan tidak sepenuhnya tergantung pada karyawan. Di organisasi pemerintahan, karyawan atau birokrat mengembangkan akuntabilitas ganda (*dual accountability*), yakni bertanggungjawab kepada kepala organisasinya (di Pemda disebut SKPD atau kepala daerah) dan juga kepada masyarakat (yang diwakili oleh lembaga perwakilan atau DPRD). Anggaran dibuat oleh kepala bagian dan diusulkan oleh kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang sesuai dengan pemerintah daerah yang berlaku.

Pada saat ini, dalam penganggaran di pemerintah daerah di Indonesia dikenal dengan mekanisme penganggaran partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, yang mencakup tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pada prinsipnya mekanisme ini bertujuan menyaring dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang dapat diatasi dengan kewenangan urusan yang dimiliki oleh pemerintah.

Setelah usulan-usulan masyarakat disesuaikan dengan urusan masing-masing SKPD, maka akan dihasilkan dokumen perencanaan yang disebut dengan RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Berdasarkan program/kegiatan yang dicantumkan dalam RKPD ini Pemda membuat dokumen kebijakan dan prioritas anggaran serta plafon (pagu) anggaran untuk setiap program/kegiatan, sebelum ditetapkan sebagai anggaran daerah.

Penganggaran partisipasi merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep panganggaran ini sudah berkembang pesat dalam sektor swasta (bisnis), namun tidak demikian halnya pada sektor publik. Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Murray,1990 dalam Sumarno, 2005). Utomo (2006) mengemukakan bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat mendorong bawahan melakukan senjangan anggaran.

Hal ini mempunyai implikasi negatif seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap unit pertanggung jawaban mereka. Salah satu alasan diterapkannya anggaran partisipatif yaitu karena adanya asimetri informasi yaitu perbedaan informasi yang dimiliki bawahan dengan atasan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa alasan di antaranya yaitu karena penetapan anggaran tidak dapat dilakukan seoptimal mungkin ketika sub ordinat atau manajemen tingkat bawah memiliki informasi yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dibandingkan superior atau manajemen tingkat atas.

Jika informasi bawahan lebih baik daripada atasan (asimetri informasi), maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran. Partisipasi penganggaran ini diperlukan karena bawahan yang lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya, diharapkan dengan partisipasi penganggaran akan tercipta anggaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses para individu, yang kinerjanya di evaluasi dan memperoleh pengkomitmen organisasian berdasarkan pencapaian target anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran. Kemudian Welsch et al dalam Fitri (2004) mengemukakan dengan adanya partisipasi anggaran dari manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran, mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua hal.

Pertama, proses partisipasi mengurangi asimetri informasi dalam organisasi, dengan demikian memungkinkan manajemen tingkat atas mendapatkan informasi mengenai masalah lingkungan dan teknologi dari manajer tingkat bawah yang mempunyai pengetahuan khusus. Kedua, proses partisipasi dapat menghasilkan komitmen yang lebih besar dari manajemen tingkat bawah untuk melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran. Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan.

Namun, oleh karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan (terdapat asimetri informasi), maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi

anggaran. Bawahan memberikan informasi yang biasanya dari informasi pribadi mereka, dengan membuat budget yang relatif lebih mudah dicapai (yaitu dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan). Atasan mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih daripada bawahan mengenai unit tanggung jawab bawahan, ataupun sebaliknya.

Baiman (1982) dalam Kren (1992) mengidentifikasi 2 jenis informasi utama dalam organisasi yaitu *decision influencing* dan *job relevant information (JRI)*, yakni informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik. (Kren, 1992 dalam Vebyana, 2003), mengidentifikasi dua tipe utama dari informasi perilaku manajer dalam pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan agar tercapai.

(Merchant 1981, Chow et al. 1988, serta Nouri dan Parker, 1998 dalam Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Ranga Bawono, 2006) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang mereka miliki. Atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi asimetri informasi dalam hubungan atasan dan bawahan.

Dalam hal ini informasi *job relevan information* membantu memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi manajer mengenai alternatif keputusan dan

tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tersedianya informasi job relevan akan membantu manajer dalam membuat keputusan-keputusan penting serta dapat membantu manajer untuk memprediksi keadaan lingkungan organisasi secara tepat. Dalam perusahaan bisnis, bawahan menerima kompensasi berupa bonus apabila mampu memenuhi atau melebihi target anggaran dan *punishment* bila tidak mampu memenuhi. Agar mempermudah pencapaian target, manajer berusaha memperkecil target dalam anggaran (Utomo, 2006).

Bila bawahan diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevant dengan tugas (Yusfaningrum, 2005). Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI akan turut meningkat. Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya asimetri informasi.

Fenomena yang terjadi, rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Tidak adanya perubahan terhadap pelayanan kepada pasien, tidak saja dialami oleh pasien dari kalangan tidak mampu, tetapi juga dialami oleh kalangan berada, mereka masih merasakan pelayanan yang kurang memuaskan.

Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu

antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut.

Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Pada rumah sakit yang berbentuk BLU, bentuknya lebih bersifat otonom dengan manajemen BLU, maka sebuah rumah sakit mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu

pelayanan bagi semua pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, menjalin hubungan dengan pihak ketiga, dan tidak menumpuk keuntungan saja, sehingga BLU masih tetap harus melayani masyarakat miskin.

Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Menurut penelitian Audrey M Siahaan (2005), untuk bertahan hidup, rumah sakit harus memikirkan ulang strategi mereka. Ini disebabkan bahwa rumah sakit pada tahun-tahun belakangan ini mengalami persaingan yang semakin besar, pengendalian-pengendalian biaya yang semakin ketat dan tuntutan yang lebih besar akan akuntabilitas publik.

Rumah sakit diberi kewenangan dan otonomi yang luas dalam mengelola sumber daya sehingga pelayanan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Di dalam rumah sakit terdapat pergeseran paradigma dari organisasi yang bukan bisnis menjadi bisnis. Perubahan lingkungan secara alamiah akan mendorong rumah sakit menjadi suatu organisasi

yang multi produk sehingga membutuhkan penanganan dengan konsep manajemen yang tepat. Rumah sakit secara keseluruhan merupakan organisasi yang mempunyai berbagai unit bisnis strategi (Audrey M Siahaan, 2005).

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi belum banyak dilakukan. Penelitian dilakukan Falikhatun (2007) mengatakan asimetri informasi mempunyai pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap hubungan anggaran partisipatif dengan *budgetary slack*. Penelitian lain yang dilakukan oleh supanto (2010) menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi memoderasi hubungan anggaran partisipatif dengan *budgetary slack*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian warono (1998) dalam supanto (2010) yang mengatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh sebagai variabel yang memoderasi pada hubungan anggaran partisipatif dengan *budgetary slack*.

Penelitian yang dilakukan Krisler Bornadi Ompusungu dan Icuk Rangga Bawono (2006) mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi studi pada badan layanan umum Universitas Negeri di Kota Purwokerto Jawa Tengah tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi anggaran dan *job relevant information* terhadap asimetri informasi. Dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa proses penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi bawahan yang mempunyai informasi berkenaan dengan tugas, tidak mengakibatkan menurunnya asimetri informasi.

Hal ini sejalan dengan Utomo (2006) dimana bawahan yang memiliki informasi yang lebih akurat dari pada atasan berarti bawahan tersebut lebih

mengetahui hal yang mampu dilakukannya dibandingkan dengan atasan. Informasi yang tidak disampaikan sepenuhnya kepada atasan menjadi nilai lebih bagi bawahan, dalam artian bawahan memiliki kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partisipasi dalam penyusunan anggaran, namun tidak semuanya informasi yang dimiliki oleh bawahan disampaikan dalam proses tersebut.

(Merchant 1981, Chow et al. 1988, serta Nouri dan Parker, 1998 dalam Mulyasari 2005) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang mereka miliki. Atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi asimetri informasi dalam hubungan atasan dan bawahan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Krisler Bornadi Ompusungu dan Icuk Rangga Bawono (2006) dengan menguji kembali pada setting dan responden yang berbeda. Penelitian ini mengambil subyek organisasi yang ada pada Rumah Sakit Pemerintah dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran rumah sakit, sedangkan pada penelitian Krisler Bornadi Ompusungu dan Icuk Rangga Bawono subyek penelitian mengambil subyek organisasi yang ada di badan layanan umum Universitas dalam menyusun anggaran yang dilakukan oleh kepala sub bagian.

Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada empat buah rumah sakit yang sudah BLU di Sumatera Barat seperti: Rumah Sakit Umum M. Djamil Padang, Rumah Sakit Umum Pariaman, Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD Payakumbuh, dan Rumah Sakit Umum Daerah Solok. Hal ini terkait adanya permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan rumah sakit yang sudah BLU di Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan *Job Relevant Information* (JRI) terhadap Asimetri Informasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Rumah Sakit Umum Yang Sudah BLU di Sumatera Barat).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi.
2. Sejauhmana pengaruh partisipasi anggaran terhadap *job relevant information* (jri).
3. Sejauhmana pengaruh *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi.
4. Sejauhmana penengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri).
5. Sejauhmana pengaruh *budgetary slack* terhadap asimetri informasi.
6. Sejauhmana pengaruh komitmen organisasi terhadap asimetri informasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang dapat diteliti oleh peneliti namun karena pertimbangan dan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi.
2. Sejauhmana pengaruh partisipasi anggaran terhadap *job relevant information* (jri).
3. Sejauhmana pengaruh *job relevant information* terhadap asimetri informasi.
4. Sejauhmana pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi.
2. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap *job relevant information* (jri).

3. Pengaruh job relevant information terhadap asimetri informasi.
4. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:

Menambah pengetahuan serta menambah wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan:

- a. Dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan materi perkuliahan sebagai tambahan ilmu dari realita yang ada.
- b. Sebagai sumbangan ilmiah dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan sebagai bahan informasi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

3. Bagi para praktisi:

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan anggaran rumah sakit umum yang sudah BLU dalam meningkatkan kinerja.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Hampir semua penelitian yang dilakukan terhadap anggaran berhubungan dengan teori-teori berikut ini (Shield dan Shield, 1998 dalam Sumarno, 2005).

Teori Ekonomi, Teori ini menganggap bahwa individu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dimotivasi dua stimulan, yaitu: (1) berbagi informasi (*information sharing*) dan (2) koordinasi tugas (*task coordination*).

Teori Psikologi, menganggap bahwa partisipasi anggaran menyediakan pertukaran informasi antara atasan dan bawahan (Hopwood, 1976; Locke dan Schweiger, 1979; Locke dan Latham, 1990 dalam Sumarno, 2005). Ada dua alasan utama, yaitu (1) keterlibatan atasan dan bawahan dalam partisipasi anggaran mendorong pengendalian informasi yang tidak simetris dan ketidakpastian tugas, (2) melalui partisipasi anggaran, individu dapat mengurangi tekanan tugas dan mendapatkan kepuasan kerja, selanjutnya dapat mengurangi senjangan anggaran.

1. Asimetri Informasi

Menurut Dunk (1993) *Information asymmetry exists only when subordinates' information exceeds that of their superiors*. Artinya asimetri informasi terjadi ketika bawahan memiliki informasi lebih dibandingkan atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban bawahan. Atau dengan kata lain terdapatnya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan

dengan informasi yang dimiliki atasan karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan.

Atasan mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih daripada bawahan mengenai unit tanggung jawab bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan pertama terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut asimetri informasi.

Pembahasan lebih dalam diarahkan pada asimetri informasi kedua, karena sebenarnya tingkat kemampuan masing-masing unit yang sebenarnya sangat jelas diketahui oleh bawahan, sementara pengetahuan atasan tentang kemampuan tiap unit hanya bergantung pada laporan yang dibuat oleh bawahan (Utomo, 2006). Dalam anggaran konvensional dimana penyusunannya dilakukan secara *top-down* kondisi diatas dapat terjadi karena tidak ada ruang dimana atasan dan bawahan dapat berkomunikasi dan saling bertukar pengetahuan mengenai apa yang terjadi dalam unit tanggung jawab bawahan. Dink mendefenisikan asimetri informasi sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki oleh atasannya.

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yakni *principal* (atasan)

memberikan wewenang kepada agen (bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. Kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya.

Dunk dalam Fitri (2004) mendefinisikan asimetri informasi sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi. Oleh karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan (terdapat asimetri informasi), maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran. Shields dan Young (1993) dalam Fitri (2004) mengemukakan beberapa kondisi perusahaan yang memungkinkan terjadinya asimetri informasi, yaitu:

- perusahaan yang sangat besar,
- mempunyai penyebaran secara geografis,
- memiliki produk yang beragam, dan
- membutuhkan teknologi.

Dengan adanya partisipasi anggaran dari manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran, mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua hal. Pertama, proses partisipasi mengurangi asimetri informasi dalam organisasi, dengan demikian memungkinkan manajemen

tingkat atas mendapatkan informasi mengenai masalah lingkungan dan teknologi, dari manajer tingkat bawah yang mempunyai pengetahuan khusus. Kedua, proses partisipasi dapat menghasilkan komitmen yang lebih besar dari manajemen tingkat bawah untuk melaksanakan rencana anggaran dan memenuhi anggaran.

Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan. Namun, oleh karena informasi bawahan lebih baik daripada atasan (terdapat asimetri informasi), maka bawahan mengambil kesempatan dari partisipasi penganggaran. Diharapkan dengan partisipasi penganggaran akan dapat mengurangi terjadinya asimetris informasi.

Menurut Dunk (1993) dalam Widiastuti (2006) asimetri informasi diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Informasi yang dimiliki bawahan dibandingkan dengan atasan
- b. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal
- c. Kinerja potensial
- d. Teknis pekerjaan
- e. Mampu menilai dampak potensial
- f. Pencapaian bidang kegiatan

2. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Bastian, 2006). Munandar (2007:1) mendefenisikan anggaran (*budget*) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anthony dan Govindarajan (2005:90) mendefinisikan anggaran “sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi”.

Hansen dan Mowen (2004:354) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional. Definisi anggaran menurut Mulyadi (2001) yaitu, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat penting dalam perencanaan yang dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu yang relatif singkat.

a. Fungsi Anggaran

Banyak ahli mengemukakan mengenai fungsi dari anggaran. Secara umum anggaran merupakan rencana jangka pendek atau panjang yang disusun oleh perusahaan. Fungsi utama anggaran menurut Mardiasmo (2002:63-66), yaitu:

1. Fungsi Perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program, atau bagian dari program dalam jangka pendek umumnya satu tahun.

2. Fungsi Koordinasi dan komunikasi

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan dalam proses anggaran. Selanjutnya setiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3. Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan.

4. Fungsi Pengendalian

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, karena anggaran yang telah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut.

5. Anggaran merupakan alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan keluarga.

6. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena melalui anggaran tersebut dapat

diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

7. Anggaran merupakan alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sebagai alat penilai kinerja manajemen, anggaran berfungsi sebagai alat pengendali perencanaan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD. Masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2005) anggaran operasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Untuk menyesuaikan rencana strategis
2. Untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi
3. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang yang mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka
4. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

b. Manfaat proses penganggaran menurut Garrison dan Noreen (2000

343) sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen melalui organisasi.
2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan.
3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin.
4. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya masalah potensial sebelum terjadinya.
5. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian.
6. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat berlaku bagi *benchmark* untuk mengevaluasi kinerja pada waktu berikutnya.

3. Partisipasi Anggaran

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi juga diartikan suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan beberapa pihak dalam penentuan tujuan bersama yang akan mempunyai pengaruh terhadap pihak yang terlibat di masa depan. Metode partisipasi dalam suatu organisasi yang sering dipakai ada 3 jenis yaitu:

1. Partisipasi individu

Partisipasi individu terjadi ketika bawahan memberikan usulan kepada atasannya dan mereka mendiskusikan usulan tersebut. Hal ini biasanya terjadi ketika atasan memiliki inisiatif untuk mendiskusikan tugas-tugas bawahannya.

2. Manajemen konsultasi

Sistem manajemen mengharuskan diadakannya pertemuan dengan bawahan ketika ada suatu kondisi yang mengharuskan meminta usul atau pendapat dari bawahan untuk pemecahan masalah-masalah operasi. Pada manajemen konsultasi ini keputusan tetap berada pada atasan meskipun hasilnya ditentukan dari usulan dan saran bawahan.

3. Manajemen demokrasi

Pada manajemen demokrasi keputusan berada pada seluruh anggota kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Robbins (2003:179) “Partisipasi merupakan suatu konsep dimana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya.” Menurut Brownell (1982) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Brownell (1982) dalam Sumarno (2005) menerangkan partisipasi anggaran sebagai berikut: “partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran.” Sementara Brownell (1982) dalam Riyadi (2000) dalam Ikhsan (2007) menyatakan bahwa partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan

pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Maka proses anggaran secara partisipasi sangat dibutuhkan.

Dengan adanya penyusunan anggaran secara partisipasi dapat terjadi pertukaran informasi baik antara atasan dengan bawahan maupun level manajemen yang sama. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individu terlibat dan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut. Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang membawa efek di masa yang akan datang bagi mereka yang membuat keputusan.

Partisipasi juga merupakan suatu proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan kemungkinan akan dihargai atas dasar tercapainya target anggaran mereka. Keith Davis dan Newstorm (1985) dalam Novana (2002) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan membagi tanggung jawab bersama. Dalam konteks yang lebih spesifik partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target.

Inti dari partisipasi anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh tingkatan organisasi. Atasan biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi lain, atasan mempunyai perspektif yang lebih luas atas

perusahaan secara keseluruhan yang sangat vital dalam pembuatan anggaran secara umum. Setiap tingkatan tanggung jawab dalam suatu organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam suatu sistem kerjasama penyusunan anggaran.

Disimpulkan bahwa partisipasi dalam penyusunan tujuan mengarahkan pada pendiskusian tugas dengan orang yang lebih ahli (dalam hal ini salah satunya atasan). Namun, ketika tugasnya sederhana, pendekatan yang lebih efektif menjadi sangat jelas sehingga diskusi dengan atasan menjadi tidak terlalu penting karena bawahan dapat memutuskan sendiri.

Partisipasi anggaran pada dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk keterlibatan para atasan secara keseluruhan dan diharapkan cepat meningkatkan kinerja. Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang diketahui. Dalam hal ini, bawahan mungkin saja mengungkapkan beberapa informasi pribadinya yang dapat dimasukkan dalam penetapan anggaran. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam partisipasi anggaran sebagai berikut:

a. Keterlibatan

Keuangan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan pemerintahan. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD, dengan tahapan penyusunan rencana kerja anggaran dan persetujuan raperda APBD, proses penyusunan APBD ini melibatkan partisipasi

setiap pegawai mulai dari level kasubag hingga kepala dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara tidak langsung berdampak pada etika dalam bekerja yaitu tanggungjawab dalam anggaran.

b. Pengaruh

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Brownell, 1982 dalam Fitri, 2004).

c. Komitmen

Karena identifikasi dan ego keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi berkaitan dengan kinerja dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget (Murray, 1990: 104-123).

Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Murray, 1990 dalam Sumarno, 2005). Utomo (2006) mengemukakan bila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dapat mendorong bawahan melakukan senjangan anggaran. Hal ini mempunyai implikasi negatif seperti kesalahan alokasi sumber daya dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap unit pertanggungjawaban mereka (Dunk dan Nouri, 1998 dalam Webb, 2002). Partisipasi anggaran memberikan kesempatan itu, sehingga secara logis dapat diduga bahwa peningkatan partisipasi akan mengurangi asimetri informasi.

Partisipasi anggaran dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana keterlibatan kepala bagian, kepalaseksi, dan kepala sub bagian yang

berperan dalam penyusunan anggaran rumah sakit berdasarkan teori Milani (1975) dalam Ratnawati (2004) yaitu dengan indikator partisipasi anggaran yang terdiri dari:

- a. Pendapat penyusunan anggaran
- b. Penilaian anggaran
- c. Permintaan pendapat tentang anggaran
- d. Pengaruh anggaran
- e. Pentingnya usulan anggaran
- f. Keterlibatan manajer

4. *Job Relevant Information (JRI)*

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang *job relevant information (JRI)* memahami sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Krisler Bornadi Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) menambahkan bahwa JRI membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

JRI dapat meningkatkan kinerja karena memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pemilihan serangkaian tindakan yang lebih efektif. JRI yaitu informasi untuk

mengambil tindakan agar tercapai hasil lebih baik. Bawahan sebenarnya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan atasan. Informasi yang dimiliki bawahan yang berhubungan dengan tugas, akan membuat bawahan lebih keras dalam berusaha dan jauh lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas dibandingkan dengan atasan yang tidak memiliki informasi yang berhubungan dengan tugas.

Dengan adanya partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran, maka bawahan dapat memberikan atau memasukan informasi lokal yang dimilikinya. Dengan cara ini bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin saja dapat dimasukkan dalam anggaran sebagai dasar penilaian. Dalam hal ini informasi *job relevant* dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai alternatif-alternatif keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bagi pembuat keputusan.

Dalam penelitian Campbell dan Gingrich (1986) dalam Kren (1992) beberapa pemrograman berpartisipasi secara aktif dalam mendiskusikan rencana kegiatan dengan para atasan mereka dan benar-benar berusaha untuk memenuhi target yang ditetapkan. Tujuan dengan tingkat kesulitan yang sama juga dibebankan kepada pemrogram lainnya. Hasilnya, pemrogram yang dilibatkan menunjukkan pencapaian secara signifikan dibanding pemrogram yang tidak dilibatkan secara keseluruhan namun tidak dalam program-program sederhana.

Peran partisipasi dalam kondisi lingkungan tinggi menjadi penting karena dengan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan dihasilkan *job relevant information* atau JRI (Kren, 1992 dalam Vebyana, 2003). JRI juga dapat meningkatkan kinerja, karena memungkinkan perkiraan lebih akurat atas alternative tindakan yang diambil saat kondisi lingkungan berubah. (Kren, 1992 dalam Vebyana, 2003), mengidentifikasi dua tipe utama dari informasi perilaku manajer dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja dan *job relevant information* (JRI) yaitu informasi untuk mengambil tindakan agar tercapai.

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Krisler Bornadi Omposunggu dan Icut Rangga Bawono, 2006). Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut meningkat. Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya asimetri informasi.

Job relevant information diukur dengan menggunakan teori yang dikembangkan Kren (1992) dalam Vebyana (2003):

- a. Mendapat informasi yang jelas
- b. Mempunyai informasi yang memadai
- c. Memperoleh informasi yang strategi
- d. Mencari informasi yang tepat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi belum banyak dilakukan. Dunk (1993) misalnya, dalam penelitiannya *the effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack* Dunk mengajukan hipotesis bahwa tidak ada interaksi antara partisipasi anggaran, asimetri informasi dan penekanan anggaran yang mempengaruhi senjangan anggaran. Akan tetapi hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi dengan senjangan justru tergantung pada asimetri informasi dan penekanan anggaran.

Merchant (1981), Chow et al. (1988) serta Nouri dan Parker (1998) dalam Mulyasari (2005) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang mereka miliki. Atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi asimetri informasi dalam hubungan atasan dan bawahan.

Penelitian Yusfaningrum, Kusnariyanti dan Ghozali (2005) kontradiktif dengan penelitian Kren (1992). Yusfaningrum, Kusnasriyanti dan Ghozali (2005) menemukan hubungan antara partisipasi dengan JRI dimana dalam proses partisipasi, bawahan diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas.

Supriono, R. A. & Akhmad Sykhroza. (2003) dalam penelitiannya mengenai peran asimetri informasi dan peresponan keinginan sosial sebagai variabel moderating hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajer di Indonesia, secara simultan asimetri informasi dan peresponan keinginan sosial memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dan kinerja manajerial, sedangkan secara parsial hanya asimetri informasi yang memiliki peranan penting didalam memoderasi pengaruh dan hubungan antara anggaran dengan kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan Meidiawati (2004) mengenai peranan asimetri informasi, keterlibatan pekerjaan dan kecukupan anggaran terhadap partisipasi penganggaran dan terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajemen, dapat diketahui partisipasi penganggaran mempunyai hubungan secara marginally signifikan terhadap kinerja dan asimetri informasi mempengaruhi secara positif signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dan kinerja. Sedangkan kecukupan anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan partisipasi penganggaran dengan kinerja.

Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) mengakomodir kontradiktif penelitian yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, *job relevant information* dan asimetri informasi. Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) menemukan bahwa proses penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi bawahan yang mempunyai informasi berkenaan dengan tugas, tidak mengakibatkan menurunnya asimetri informasi bahwa kekurangan partisipasi anggaran jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh

akan menimbulkan perilaku menyimpang, baik dari bawahan maupun oleh atasan. Selain itu, tampak bahwa atasan belum mampu menggali informasi yang dimiliki oleh bawahan dalam proses partisipasi.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi juga diartikan suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi adalah suatu proses yang melibatkan beberapa pihak dalam penentuan tujuan bersama yang akan mempunyai pengaruh terhadap pihak yang terlibat di masa depan.

Pengertian partisipasi dalam proses penyusunan anggaran lebih rinci dijelaskan oleh French *et al*, (1960) dalam Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) sebagai suatu proses kerjasama dalam pembuatan keputusan yang melibatkan dua kelompok atau lebih yang berpengaruh pada pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Disini partisipasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang menekankan pada proses kerjasama dari berbagai pihak, baik bawahan maupun atasan.

Penelitian yang dilakukan Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) menguatkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika

bawahan memiliki informasi lebih dibandingkan atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban bawahan. Atau dengan kata lain terdapatnya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki atasan karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Dengan partisipasi anggaran memberikan kesempatan itu, sehingga secara logis dapat diduga bahwa peningkatan partisipasi akan mengurangi asimetri informasi.

2. Hubungan partisipasi anggaran terhadap *job relevant information* (jri)

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Partisipasi adalah bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2005). Adanya partisipasi maka akan memberikan manfaat dalam mempengaruhi sikap positif, serta meningkatkan kerjasama antara atasan dan bawahan sehingga dapat mencegah terjadinya asimetri informasi. Peneliti melihat bila partisipasi anggaran meningkat maka JRI juga akan turut

meningkat. Hubungan penguatan ini mengindikasikan peningkatan JRI menyebabkan berkurangnya asimetri informasi.

3. Hubungan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi

Kren (1992) dalam Krisler Bornadi Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) mengidentifikasi dua jenis informasi utama dalam organisasi yaitu *decision influencing* dan *job relevant information* (JRI), yakni informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik.

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang *job relevant information* (jri) memahami JRI sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Krisler Bornadi Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) menambahkan bahwa JRI membantu bawahan atau pelaksana anggaran dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan sehingga atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas (Krisler Bornadi Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono, 2006). Hal ini dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

4. Hubungan partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri)

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Penelitian yang dilakukan Krisler Bornadi Ompusunggu dan Icuk Rangga Bawono (2006) menguatkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi anggaran terhadap asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika bawahan memiliki informasi lebih dibandingkan atasan mengenai suatu unit organisasi atau pusat pertanggungjawaban bawahan. Atau dengan kata lain terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki atasan karena perbedaan pandangan dan kepentingan, dengan adanya partisipasi anggaran dapat memberikan kesempatan itu.

Partisipasi anggaran memberikan manfaat dalam mempengaruhi sikap positif, serta meningkatkan kejasama antara atasan dan bawahan, sehingga dapat mencegah terjadinya asimetri informasi. Keikutsertaan bawahan dalam penyusunan anggaran, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk dapat mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan tugasnya kepada atasan,

sehingga atasan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugasnya. Bila partisipasi anggaran meningkat maka *job relevant information* (jri) juga meningkat, hubungan peningkatan antara partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) dapat mengurangi asimetri informasi.

D. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

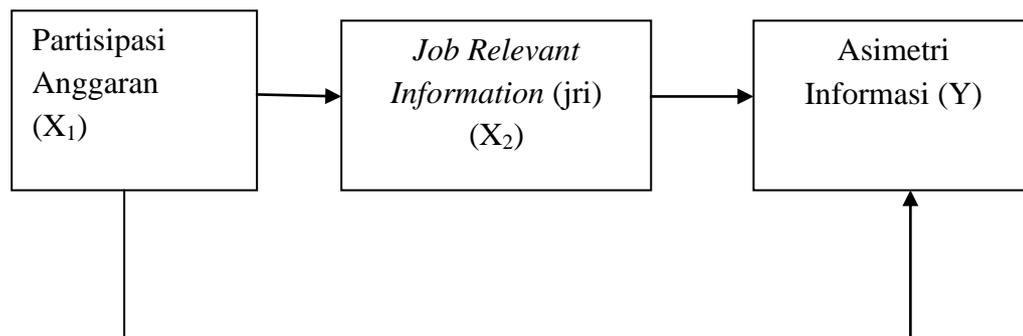
Dunk mendefinisikan asimetri informasi sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki oleh atasannya. Atau dengan kata lain terdapatnya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki bawahan dengan informasi yang dimiliki atasan karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan.

Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hal ini terjadi karena partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran kemungkinan juga mempengaruhi asimetri informasi, karena dengan adanya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran maka bawahan merasa terlibat dan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran, sehingga bawahan diharapkan dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik (Anthony dan Govindarajan, 2007:95). Dengan adanya partisipasi maka akan memberikan manfaat dalam mempengaruhi sikap positif, serta meningkatkan kerjasama antara atasan dan bawahan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Partisipasi anggaran juga berpengaruh terhadap *job relevant information* (jri) dimana partisipasi anggaran meningkat maka *job relevant information* (jri) juga

akan turut meningkat. Hubungan ini dapat mengakibatkan asimetri informasi berkurang. JRI mempunyai pengaruh terhadap asimetri informasi. Dengan adanya JRI dapat membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. *Job relevant information* (jri) membantu atasan memperoleh pengetahuan yang relevant dengan tugasnya apabila bawahan diberi kesempatan dalam memberikan masukan atau informasi kepada atasan, hal ini dapat mengurangi asimetri informasi.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk hubungan antara partisipasi anggaran dan *job relevant information* terhadap asimetri informasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi.

H₂: Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap *job relevant information* (jri).

H₃: *Job relevant information* (jri) berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi.

H₄: Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi, dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,246 > 1,687$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,395.
2. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap *job relevant information* (jri), dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $11,535 > 1,687$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,882.
3. *Job relevant information* (jri) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri informasi, dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $11,405 > 1,687$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan koefisien regresi (β) bernilai positif 0,622.
4. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap asimetri informasi melalui *job relevant information* (jri) dengan besarnya pengaruh tidak langsung 21,67%.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis hanya memasukan dua variabel yang berpengaruh terhadap asimetri informasi, yaitu partisipasi anggaran dan *job relevant information* (jri). Diduga masih banyak faktor lain yang mempengaruhi asimetri informasi.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner dimana responden terbatas dan tidak dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Diharapkan penelitian selanjutnya, selain menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data juga dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
3. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi jawaban responden.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan, sehingga dapat terjalin komunikasi antara atasan dan bawahan.

2. Terkait dengan *job relevant information* (jri) di rumah sakit umum yang sudah BLU di Sumatera Barat, bahwa *job relevant information* (jri) harus ditingkatkan karena JRI dapat memberikan prediksi yang akurat mengenai kondisi lingkungan yang mungkin dilakukannya, pemilihan serangkaian tindakan tindakan yang lebih efektif.
3. Penelitian ini masih terbatas pada partisipasi anggaran, *job relevant information* (jri) terhadap asimetri informasi. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.